

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Fitriyani ¹, Delly Maulana ², Obed Bida ³

Universitas Terbuka

Koresponden penulis: zhafiradli@gmail.com

Abstract

The goal to be achieved in this research is to find out the implementation of community information group (KIM) policies based on community empowerment in Paser Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. In order to obtain data related to the required research focus, the researchers conducted interviews with the KIM chairman, KIM members and community leaders. In order to support the information obtained, the researcher also conducted field observations. The results of this study indicate that the communication established by KIM members is based on flexible timeframes, limited to communication via WhatsApp. Formal recruitment has not been optimally carried out because the KIM organization is voluntary in which the majority of its members are village officials themselves so that the resources recruited do not have the expertise in the required field, namely IT. the members do not yet have the ability to be competent in their field, considering that this organization is voluntary, the members who participate are also from the village community who do not yet have qualified skills. the organizational structure is explained that in KIM the organizational structure consists of a chairman and members where the structure is a differentiator in completing tasks and responsibilities. Obstacles faced which include the lack of incentives that make KIM members not run according to formal procedures, low understanding of journalism, low time management and low facilities and infrastructure owned

Keywords: KIM, Community, Implementation

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kelompok informasi masyarakat (KIM) berbasis pemberdayaan masyarakat kabupaten paser. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Guna mendapatkan data terkait fokus penelitian yang diperlukan maka peneliti melakukan wawancara kepada ketua KIM, anggota KIM dan tokoh masyarakat. Guna mendukung informasi yang didapatkan peneliti juga melakukan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin oleh anggota KIM didasarkan pada fleksibilitas waktu karena hanya terbatas pada komunikasi melalui whatsapp. perekrutan secara formal belum secara maksimal dilakukan karena organisasi KIM bersifat sukarela dimana yang menjadi mayoritas anggotanya adalah perangkat desa sendiri sehingga sumberdaya yang terjangkau tidak memiliki tupoksi keahlian dibidang yang diperlukan yaitu IT. anggota belum memiliki kemampuan secara kompeten di bidangnya mengingat organisasi ini bersifat sukarelaan maka anggota yang ikut juga dari kalangan desa yang belum memiliki kemampuan yang mumpuni. struktur organisasi dijelaskan bahwa dalam KIM struktur organisasi terdiri dari ketua dan anggota dimana struktur tersebut sebagai pembeda dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab. Kendala yang dihadapi dimana diantaranya adalah Tidak adanya insentif yang menjadikan anggota KIM tidak berjalan sesuai dengan prosedur formal, rendahnya Pemahaman Ilmu Jurnalistik, rendahnya manajemen waktu dan rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki

Kata Kunci: KIM, Masyarakat, Implementasi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk menguasai dan menggunakan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan negara lain. Penggunaan teknologi informasi telah dipergunakan hampir seluruh negara dunia. Negara yang terlambat dalam penggunaan teknologi informasi akan kalah bersaing dengan negara yang memanfaatkan teknologi informasi terbaru. Teknologi informasi terus mengalami perkembangan secara pesat yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja dan dari siapa saja. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam perekonomian suatu negara, pertumbuhan dan penggunaan teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian negara tersebut.

Semakin tinggi perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, maka semakin mendorong tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan (Dwimawati, 2019).

Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Menurut riset *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta jiwa. Dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna (Fitriani, 2020).

Selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7 jam 59 menit perhari untuk berselancar di dunia maya. Angka tersebut melampaui rata-rata global yang hanya menghabiskan waktu 6 jam 43 menit di internet perharinya.

Hasil survey APJII pengguna internet di Indonesia periode 2019-kuartal II 2020 secara daring pada mengumunkan, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal II tahun 2020 naik menjadi 73,7 % dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna (Aldhama & Study, 2022). Pengguna di Pulau Jawa masih berkontribusi terbesar terhadap kenaikan jumlah pengguna internet tersebut, yakni 56,4 %. Pengguna internet terbesar kedua berasal dari Pulau Sumatera dengan 22,1 %. Disusul Pulau Sulawesi 7 persen, Kalimantan (6,3 %), Bali-Nusa Tenggara (5,2 %), dan Maluku-Papua (3 %). Belum terjadinya pemerataan seperti data di atas mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara merata danimbang untuk setiap daerah. Perlu adanya peningkatan kualitas jaringan internet sehingga tidak terjadi kesenjangan internet di Indonesia (Aldhama & Study, 2022).

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan informasi di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Permen Kominfo No.17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Sebagai tindak lanjut untuk kebijakan tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Lembaga Komunikasi Sosial adalah lembaga komunikasi pedesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media dan lembaga komunikasi organisasi profesi. Sedangkan Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenisnya yang di singkat KIM yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan nilai

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

tambah. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai salah fasilitas bagi masyarakat untuk mendapat informasi. Fasilitator komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) adalah suatu Lembaga Komunikasi Perdesaan yang dibentuk dari implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Kelompok Informasi Masyarakat merupakan suatu lembaga yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dibentuk dari dan untuk masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemanfaatan informasi bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan agar para Kelompok Informasi Masyarakat mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga dapat berperan aktif di dalam suatu proses pembangunan. Selain itu, dengan adanya kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi, masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi publik atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat di pedesaan. Namun, di dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat masih terdapat beberapa permasalahan. Sehingga menyebabkan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat itu belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan, 5 kelurahan dan 139 desa. Adapun Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk di Kabupaten Paser adalah:

Tabel 1. Daftar KIM Per-Kecamatan di Kabupatenn Paser

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama KIM	Tanggal Pembentukan
1.	Pasir Belengkong	Desa Suatang	Daya Mandiri	6 November 2017
2.	Pasir Belengkong	Desa Keresik Bura	Bukit Jaya	20 September 2018
3.	Batu Engau	Desa Petangis	Bolum Buen	2 November 2017
4.	Batu Engau	Desa Kerang	Kesah Taka	1 Oktober 2018
5.	Tanah Grogot	Desa Janju	Radar Taka	14 Maret 2017
6.	Kuaro	Desa Klempang Sari	Garuda Sakti	14 Maret 2017
7.	Kuaro	Desa Kendarom	Kendarom Maju	9 April 2018
8.	Kuaro	Kelurahan Kuaro	Sama Duwe	17 Juli 2019
9.	Long Ikis	Kelurahan Long Ikis	Taka Maju	15 Maret 2017
10.	Long Ikis	Desa Sawit Jaya	Sawit Jaya Mandiri	23 April 2018
11.	Long Ikis	Desa Semuntai	Mangko Bere'	10 Oktober 2019

12.	Long Kali	Kelurahan Long Kali	Telake	15 Maret 2017
13.	Muara Samu	Desa Muser	Payo Sendamai	18 September 2018
14.	Tanjung Harapan	Desa Lori	Dunia Pesisir	12 September 2018

Sumber Data: Diskominfoaster Kabupaten Paser tahun 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Paser, KIM telah terbentuk di 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 11 desa. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terbentuk mulai dari tahun 2017. Desa dan kelurahan yang ada di kabupaten memiliki kondisi geografis yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Seiring dengan arus informasi yang makin mendera dewasa ini, keberadaan kelompok informasi masyarakat (KIM) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu menjadi jaringan informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok desa. Dengan adanya KIM di desa dan kelurahan, diharapkan desa dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi. Namun, ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) khususnya pada kecamatan Long Ikis yakni:

Pertama, persoalan SDM yang belum memadai. Dari 14 orang anggota KIM, hanya 4 orang di antaranya yang berpendidikan sarjana dan selebihnya adalah lulusan SMA. Kurangnya komunikasi antara anggota mengakibatkan program KIM menjadi terhambat bahkan sering terhenti tanpa tindak lanjut. Kedua, program kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak variatif. Yakni hanya menyampaikan informasi terkait kegiatan pemerintahan desa saja, itupun melalui media sosial. Ketiga, belum ada pembinaan lebih lanjut dari Diskominfoaster selaku pembentuk KIM setelah pembentukan KIM. Hal ini dibiarkan begitu saja sehingga sebagian besar anggota belum memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di masing-masing kecamatan dan beberapa desa, seharusnya informasi mengenai pembangunan daerah maupun desa bukan lagi hal yang sulit. Karena Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sendiri berfungsi sebagai salah satu sarana penyebaran informasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun dari 14 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang sudah terbentuk belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena masyarakat desa Semuntai yang sifatnya heterogen, baik secara Geografis, Demografis maupun Geodemografis. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu ketua KIM, anggota KIM dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

1. Implementasi kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis

Saat ini Indonesia tengah dalam upaya mewujudkan masyarakat informasi. Pada tahun 2006 Indonesia mengikuti sebuah konferensi *World Summit on the Information Society* (WSIS) di Geneva. Melalui Menteri Kominfo saat itu Sofyan A. Djali, Indonesia telah sepakat untuk mewujudkan masyarakat informasi di Indonesia. Forum WSIS merupakan forum yang menghasilkan diakuinya teknologi secara formal sebagai salah satu sarana utama dalam rangka memecahkan masalah untuk menjembatani atau merubah

masalah-masalah kesenjangan digital menjadi peluang digital untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi, transparansi dan pengelolaan negara yang baik.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia adalah dibentuknya program KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Program ini merupakan sebuah program yang ditujukan untuk masyarakat agar mampu mengoptimalkan manfaat informasi di kehidupan mereka. Pemerintah mengupayakan setiap daerah di Indonesia untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang

berkonsentrasi pada penyerapan informasi, pemanfaatan dan penyebaran informasi.

Selain itu, program tersebut juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Pada dasarnya kelompok ini berusaha untuk memaksimalkan informasi melalui berbagai lini untuk mampu bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat, sehingga nantinya masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan masyarakat dari negara lain. Pemerintah mendesain program KIM agar dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Karena program KIM diharapkan akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang independen dan mandiri. Visi dari kelompok ini ialah memberdayakan masyarakat menjadi lebih produktif, lebih berpartisipasi aktif atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sehingga akan terwujud masyarakat informasi. Dengan berbasis informasi, masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan kontrol dan menjadi bagian dari keputusan ekonomi, sosial dan juga budaya. Masyarakat informasi merupakan tujuan dan cita-cita seluruh dunia yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu implementasi KIM adalah di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis dimana implementasi tersebut dijabarkan kepada beberapa indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Peran komunikasi berbasis komunitas seperti KIM keberadaan lawan bicaranya, bahkan saat terjadinya konflik (Guddykunst, 2003). KIM sebagai lembaga komunikasi nonformal di daerah, adalah pilihan tepat untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat karena dengan potensi informasi yang dimiliki masyarakat akan terintegrasi dalam pencapaian informasi yang kolektif, baik berbasis komunikasi komunitas ataupun berbasis media. Apalagi proses yang dilakukan tidak sangat strategis peranannya dalam mendapat

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan masyarakat. Martin Buber berpendapat komunikasi dalam kelompok adalah faktor penting dalam pengembangan suatu komunitas, karena dalam dialog perasaan untuk mengontrol dan memiliki sesuatu dapat diminimalisir, tiap partisipan menerima keberadaan lawan bicaranya, bahkan saat terjadinya konflik (Guddykunst, 2003). KIM sebagai lembaga komunikasi nonformal di daerah, adalah pilihan tepat untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat, karena dengan potensi informasi yang dimiliki masyarakat akan terintegrasi dalam pencapaian informasi yang kolektif, baik berbasis komunikasi komunitas ataupun berbasis media. Apalagi proses yang dilakukan tidak secara parsial, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di sana, sehingga tidak menjadi tanggungjawab pemerintah.

Namun, komunikasi yang terjalin oleh anggota KIM memiliki formasi pertemuan formal hanya di beberapa pertemuan di awal dimana para anggota lebih berfokus pada pelaksanaan program dibicarakan melalui whatsapp. Hal tersebut menjadi mekanisme yang dipilih mengingat para anggota KIM merasa bahwa whatsapp menjadi media yang mampu menjembatani kepentingan-kepentingan mereka dengan baik dimana segala program yang harus diinformasikan kepada masyarakat bisa kapan saja diakses dan dibicarakan oleh para anggota sebelum informasi tersebut disebar luarkan kepada masyarakat.

Whatsapp merupakan salah satu media sosial dengan kategori messenger atau chatting yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim pesan atau informasi secara pribadi maupun dalam suatu grup dengan berbagai fitur yang lebih user-friendly sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan dari yang muda hingga yang tua, fitur-fitur tersebut meliputi chatting, panggilan telepon, videocall, status atau whatsapp story yang lebih ringan dibandingkan dengan media sosial lainnya (Priliana, 2016). Tujuan utama dari Whatsapp ini adalah untuk menggantikan fungsi SMS pada penggunaan biasa dengan mobile messenger antar platform yang bekerja dengan berbasis pada jaringan internet, maka dari itu, Whatsapp masih membutuhkan nomor telepon untuk bertukar pesan.

Malone dan Rockart (1991) dalam (Ruliana, 2014) menyatakan bahwa bentuk baru organisasi yang disebut *adhocracy* menjadi lebih bersemangat sejak media baru seperti surat elektronik, konferensi melalui komputer, dan papan pengumuman elektronik dapat lebih memudahkan koordinasinya. Bentuk *adhocracy* berlawanan dengan struktur hierarki konvensional karena memiliki sejumlah besar komunikasi lateral serta pergantian tim yang lebih fleksibel. Kiesler (1986) dalam (Ruliana, 2014) membahas pengaruh komunikasi bermedia komputer dan caranya yang dapat mengubah kebiasaan kerja dan praktik komunikasi; ia menyatakan bahwa hal ini memungkinkan pegawai menerobos hambatan-hambatan hirarki dan departemen, prosedur pengoperasian standar dan norma organisasi.

(Tyson, Shaun & Jackson, 1992) melaporkan temuan yang konsisten dalam peningkatan komunikasi ke atas dan ke bawah, lebih banyak “pembicaraan” dalam organisasi baik yang bergerak ke atas maupun ke bawah. Peningkatan dalam

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

komunikasi ke atas dapat membantu organisasi dalam mengenali isu dan persoalan lebih dini. Tyson berpendapat bahwa pengenalan teknologi komunikasi baru dalam organisasi mempunyai potensi untuk mengubah kegiatan komunikasi, sehingga mengubah dan mempengaruhi aspek-aspek kunci struktur dan proses organisasi.

Argumentasi dari teori yang telah dikemukakan diatas menjadi salah satu penguat dari tindakan-tindakan yang dipilih oleh anggota organisasi KIM dimana mereka sering meluangkan waktu membahas program KIM melalui media whatsapp secara fleksibel. Bahkan tindakan yang mereka pilih menjadi salah satu jembatan dalam mengatasi masalah-masalah secara dini dimana hal tersebut dilatarbelakangi akses whatsapp yang bisa dijangkau kapan saja.

Dari segi efektivitas, penggunaan media whatsapp merupakan salah satu adaptasi yang bisa menjelaskan bagaimana whatsapp mampu menjawab perubahan zaman dimana di era teknologi saat ini komunikasi melalui media sosial menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih agar sebuah organisasi tetap secara maksimal menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi.

Daya dukung organisasi menyangkut tentang seberapa mungkin program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dukungan organisasi dalam pembentukan KIM ini dapat dilaksanakan, dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan organisasi. Seperti dikatakan oleh Udai Pareek, "Komunikasi keorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses aliran pengiriman dan penerimaan pesan-pesan yang berorientasikan tujuan diantara sumber-sumber komunikasi, dalam suatu pola dan melalui suatu medium atau media (Pareek, 1996).

b. Sumber Daya

Peran media kelompok komunikasi sosial dalam penyebaran informasi sudah terbukti dapat membawa masyarakat bisa memahami setiap informasi yang disampaikannya, melalui Kelompok Informasi Sosial, terutama bagi masyarakat perdesaan, yang digunakan sebagai alat silaturahmi dan pengembangan usaha bersama.

Organisasi KIM ini berupaya untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, budaya dan kegiatan lain yang bersifat ekspresif dan bersifat profit oriented. Faktor organisasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo pada bidang pemberdayaan lembaga komunikasi sosial didasarkan pada pemahaman akan pemanfaatan sumberdaya manusia serta menjadi kontribusi bagi pemberdayaan perekonomian masyarakat. Mekanisme yang menjadi salah satu pendorong pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adanya kebijakan dari pemerintah melalui peraturan menteri kominfo nomor 08/Per/M/Kominfo/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.

Implementasinya ditunjukkan dengan adanya para anggota yang berasal dan kominfo dan para wartawan melakukan sosialisasi guna menambah ilmu bagi

anggota KIM agar tetap maksimal dalam membantu masyarakat dalam pengoperasian teknologi serta penyampaian informasi.

Tindakan yang dilakukan oleh kominfo terhadap para anggota KIM merupakan salah satu dari realisasi yang termuat dalam peraturan menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 pasal 2 dimana menyatakan bahwa lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Tujuan KIM antara lain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi jejaring penyampaian informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok perdesaan.

c. Disposisi

Implementasi merupakan proses dari kebijakan publik yang bersifat krusial karena harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan berjalan efektif. Keefektifan organisasi tersebut juga tidak lepas dari indikator disposisi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai. Para anggota bertugas mengimplementasikan kebijakan disposisi terdiri dari aspek pada struktur organisasi yakni Standard Operating Procedure (SOP).

Hal lain yang penting dari pemakaian SOP adalah untuk menghindari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh anggota disetiap unitnya. Bila pelaksanaan kegiatan KIM yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan akan memungkinkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan ketidakpatuhan, artinya bila pelaksanaan kegiatan KIM yang berurutan dan sesuai dengan SOP maka akan meminimalisir ketidakpatuhan yang ada dan dapat mengontrol perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan kata lain, SOP dapat memberikan pengawasan kepada setiap anggota organisasi untuk bekerja sesuai standar. Bila bekerja berdasarkan SOP yang berlaku diorganisasi, maka akan dapat dipastikan pada saat evaluasi kerja setiap unit kerja di perusahaan dapat bernilai baik sesuai dengan tujuan dan pencapaian target kerja yang diinginkan dari organisasi itu sendiri. Menurut (Chrisyanti, 2011), pelaksanaan SOP dapat dimonitor secara internal maupun eksternal dan SOP dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan materi evaluasi mencakup aspek efisiensi dan efektivitas pemakaian SOP.

Namun, SOP yang terdapat dalam KIM tidak tertulis secara formal dimanapara anggota bekerja sesuai dengan kepentingan mereka menyampaikan sebuah informasi tanpa adanya SOP yang mengatur kegiatan tersebut, hal tersebut tentu akan berdampak pada ketidaktahuan dari evaluasi kerja apakah telah berjalan sesuai SOP atau tidak ketika tidak ada SOP yang mengatur kegiatan anggota KIM.

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Namun, sejauh ini anggota KIM berjalan sesuai dengan tindakan-tindakan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika masyarakat dirasa mengerti terkait informasi yang diberikan maka hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur pekerjaan mereka dapat terlaksana dengan baik.

Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan (Kusumastuti, 2014). Oleh sebab itu ketika sebuah organisasi tidak memiliki SOP maka penerapan manajemen tidak dapat terukur dan terarah dengan konsisten. Hal tersebut dapat terlihat dari KIM yang berjalan di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis dimana para anggota KIM tidak mengetahui secara pasti tindakan-tindakan tersebut telah sesuai dengan tujuan ataukah tidak memiliki konsistensi dalam setiap tindakan-tindakannya ketika melaksanakan kegiatan.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan (Subekti et al., 2017). Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

KIM pada prinsipnya didirikan sebagai organisasi nonformal yang membantu pemerintah guna penyampaian informasi kepada masyarakat berbasis teknologi. Namun, dalam rekrutmen nya terbuka bagi siapapun anggota masyarakat yang ingin mendedikasikan dirinya guna mendukung program pemerintah dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kebijakan yang dijalankan banyak yang berjalan tidak sesuai dengan sumberdaya yang memiliki disposisi yang tepat.

Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana anggota KIM dipegang oleh aparat desa sendiri tanpa adanya ahli dibidang teknologi informasi. Sekalipun pelaksanaannya tetap berjalan namun ketika pekerjaan tidak dijalankan oleh orang-orang yang memiliki dedikasi di bidangnya maka tujuan tidak akan berjalan dengan maksimal.

d. Struktur organisasi

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif, terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 2001). Untuk mencapai tujuan itu diperlukanya proses pengorganisasian, dan proses ini tercermin dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi merupakan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggung jawab, spesialisasi setiap anggota organisasi. Karena itu, Robbins menyatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins, 2001). Sementara Stoner (1992) mengatakan bahwa mengatakan bahwa struktur

organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian, komponen dan posisi dalam suatu perusahaan.

Beberapa argumen diatas maka dapat dikatakan bahwa struktur organisasi menjadi mekanisme penting dalam mengatur bagian-bagian dalam menjalankan sebuah kegiatan. Implikasinya dalam organisasi KIM

2. Faktor penghambat implementasi kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis
 - a. Tidak adanya insentif yang menjadikan anggota KIM tidak berjalan sesuai dengan prosedur formal.

Menurut (Elias, 2008), insentif adalah mengenai bagaimana orang-orang diberi penghargaan sesuai dengan nilai-nilai mereka dalam suatu organisasi. Menurut (Simamora, 2004) insentif adalah penghargaan yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Insentif yang diberikan kepada karyawan merupakan keputusan dasar yang secara signifikan akan mempengaruhi kinerja organisasi (Stikeleather, 2016)

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa insentif memiliki pengaruh yang signifikan dalam kinerja karyawan. Hal tersebut juga berlaku dalam organisasi non formal dimana sistem sukarela hanya mampu menjadikan para anggota tidak konsisten dalam menjalankan sebuah pekerjaan dimana mereka bisa menjalankan kewajiban pekerjaannya tidak maksimal ketika mereka harus dihadapkan pada kebutuhan perekonomian sehingga harus menjalankan rutinitas pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan tersebut. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada efektifitas organisasi KIM.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dimana dalam penelitian tersebut menyatakan argumen bahwa niat akan lebih tinggi jika diberikan insentif dibandingkan tidak diberikannya insentif (Putri, 2022). Teori proposial yang mengacu pada tindakan untuk memberikan manfaat pada orang lain serta untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika suatu tindakan diberikan insentif maka individu akan termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagaimana hasil penelitian bahwa insentif dapat meningkatkan niat anggota organisasi (Andon, 2018).

Temuan-temuan tersebut semakin memperkuat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi KIM dimana mereka memiliki niat untuk melakukan tindakan-tindakan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa demi pemberdayaan namun terhalang oleh tidak adanya insentif yang menjadikan kegiatan ini hanya bersifat sukarela sehingga mengurangi eksistensi dari kegiatan KIM dan secara langsung dan disadari berdampak pula pada efektivitas sebuah organisasi.

Organisasi baik formal maupun non formal melakukan peranan dominan manusia sebagai motor penggerak jalannya organisasi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarkhi dimana selalu

terdapat hubungan antara seseorang dan sekelompok orang atau di sebut pimpinan dan bawahan. Sukses atau tidaknya suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang di harapkan sangat di tentukan oleh manusia-manusia sebagai tenaga penggerak yang berkualitas. Insentif berperan dalam mendorong orang berprestasi dalam bekerja (Harefa, 2020). Oleh sebab itu, KIM sekalipun organisasi non formal yang hanya bersifat sukarela namun program ini memiliki tujuan besar dalam penyampain informasi kepada masyarakat maka sangat disayangkan ketika organisasi tersebut tidak diberikan fasilitas berupa insentif bagi para anggotanya guna menjamin anggotanya untuk menunjukkan loyalitas dalam bekerja.

b. Rendahnya Pemahaman Ilmu Jurnalistik

Keterampilan dan ilmu yang dimiliki tentu akan berdampak pada tindakan-tindakan dan profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam dunia jurnalistik dimana KIM yang terdiri dari anggota-anggota yang tidak memiliki keahlian dalam bidang jurnalistik belum mampu dikatakan mumpuni dalam mengembangkan informasi-indormasi yang ada dalam website.

Robbins, mendefinisikan bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robbins, 2001). Kemampuan individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor yaitu: Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Salah satu cara mengetahui kemampuan intelektual adalah dengan menggunakan Tes IQ. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan ketrampilan. Konteks KIM dalam dunia jurnalistik menekankan pada kemampuan penerimaan intelektual untuk mengembangkan kaidah-kaidah jurnalistik agar dapat menyajikan informasi yang tepat dan menarik dalam website. Ketika kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh para tim dalam organisasi KIM maka tentu akan berdampak pada kinerja yang kurang efektif.

Argumen ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dimana dalam temuan tersebut menjabarkan argumen terkait pengaruh antar kemampuan terhadap kinerja karyawan adalah signifikan positif, hal ini berarti bahwa apabila variabel kemampuan ditingkatkan maka prestasi kerja karyawan juga akan mengalami peningkatan (Wijaya, 2015). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ketika para anggota memiliki kemampuan yang mumpuni maka akan berdampak pada kualitas kerja yang baik di dalam organisasi KIM.

c. Rendahnya manajemen waktu

Manajemen waktu tidak bisa diabaikan dan justru harus menjadi prioritas utama dalam hal mencapai target (Surur & Nadhirin, 2020). Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen waktu di dalam organisasi (Sinaga, 2020) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Misalnya menentukan tingkat urgensi melakukan sebuah aktivitas.

- b. Membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan.
- c. Dapat membantu untuk mencegah terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.
- d. Membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi

Dari penjelasan ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah ketrampilan menata kegiatan, menjadwal, mengorganisasi dan pemenuhan aspek-aspek didalamnya yaitu penetapan tujuan, menyusun prioritas menyusun jadwal, bersikap tegas, menghindari penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang, dan kontrol terhadap waktu.

Oleh sebab itu, KIM harus memiliki manajemen waktu yang tepat dimana hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan dimana dapat menjadi evaluasi bagi tiap individu dalam pencapaian efektivitas kinerja yang dilakukan. tidak hanya itu, manajemen waktu juga berperan dalam mencegah terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tidak kalah pentingnya manajemen waktu dalam organisasi KIM mampu menjadikan prioritas sebagai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tidak adanya manajemen waktu yang ada dalam organisasi KIM akan berdampak pada kinerja organisasi dimana ketika waktu yang dilakukan bersifat fleksibel maka konsistensi dari setiap kegiatan KIM tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut tentu akan menghambat organisasi.

- d. Rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki

Sarana merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses berorganisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan organisasi dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana kurang memadai (Dian Lestari & Agus Yusmiono, 2018). Hal tersebut juga dapat tergambar dari kegiatan KIM yang tidak dapat berjalan dengan maksimal ketika sarana dan prasarana teknologi tidak mampu menjangkau kapasitas dimasa sekarang. Teknologi yang cukup ketinggalan jaman menjadikan penghambat penyampaian informasi dan pengoperasian informasi tidak berjalan dengan maksimal. Hal inilah yang menjadikan anggota KIM masih terkendala dalam pengelolaan informasi.

Informasi yang dikelola oleh KIM Desa Semuntai tidak hanya mengelola informasi dari desa saja, namun juga terkadang mengolah informasi dari Kabupaten yang sifatnya penting untuk diketahui masyarakat. Informasi-informasi dari desa harus segera diketahui oleh masyarakat, sehingga setiap sebelum dan setelah kegiatan, anggota KIM akan dengan segera untuk mengupdate informasi terkait hal tersebut agar semua masyarakat desa menerima informasinya.

Tugas-tugas yang dilimpahkan oleh KIM akan sangat sulit tercapai ketika tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang tersedia dimana hal tersebut dapat memberikan hambatan tersampainya informasi kepada masyarakat. Belum lagi salah satu kendala yang biasanya dihadapi oleh pengurus KIM Desa

Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Semuntai adalah ketika mereka telah membuat berita kemudian dilimpahkan penyebarluasannya ke KOMINFO Kabupaten namun proses penyebarluasannya tidak diselesaikan sehingga pengurus KIM Desa Semuntai harus kembali mengolah informasi tersebut dan menyebarkan secara mandiri. Namun media centre saat sekarang ini juga mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bupati sehingga ketika berita yang disampaikan oleh Desa diserahkan, mereka juga sedang memuat berita terkait kegiatan pimpinan daerah sehingga membuat berita dari Desa lambat untuk diterbitkan. Hal tersebut memaksakan KIM Desa Semuntai untuk membuat masyarakat secara mandiri dapat menerima informasi terkait berita-berita desa maupun kabupaten melalui media sosial yang dikelola oleh KIM Desa Semuntai. Ketika ada kendala-kendala tersebut maka akan sangat lambat terselesaikan jika tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mumpuni.

KIM Desa Semuntai juga terlibat dalam hal sosialisasi apapun yang dilakukan di Desa Semuntai dengan menyiapkan media visual atau banner yang dalam media tersebut dicantumkan logo KIM Desa Semuntai sebagai pelopor informasi sehingga membuat penilaian dari masyarakat sebagai informasi bahwa KIM Desa semuntai aktif dalam penyebarluasan informasi dengan berbagai cara meskipun pada dasarnya organisasi tersebut sangat dibatasi oleh dana dan sarana prasarana.

Dalam kesempatan pertemuan antara pengurus KIM Desa dengan KOMINFO Kabupaten Paser sebagai representative Pemerintah Daerah, seringkali KIM Desa menyampaikan keluhan terkait kebutuhan dana dan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung lancarnya program kerja KIM, namun KOMINFO Kabupaten Paser tetap memberikan jawaban yang sama bahwa anggaran yang disediakan untuk organisasi KIM sangatlah terbatas, sehingga sangat sulit untuk membantu pengembangan organisasi tersebut. Sedangkan untuk memperoleh bantuan anggaran dari Desa, juga perlu pengajuan namun pengajuannya untuk proses menuju desa pintar yang seyogyanya arah dan tujuannya sama dengan program KIM.

KESIMPULAN

Implementasi KIM didasarkan dalam beberapa indikator diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Dapat diuraikan bahwa komunikasi yang terjalin oleh anggota KIM didasarkan pada fleksibilitas waktu karan hanya terbatas pada komunikasi melalui whatsapp. Kedua terkait dengan sumberdaya dimana perekrutan secara formal belum secara maksimal dilakukan karena organisasi KIM bersifat sukarela dimana yang menjadi mayoritas anggotanya adalah perangkat desa sendiri sehingga sumberdaya yang terjaring tidak memiliki tupoksi keahlian dibidang yang diperlukan yaitu IT. Ketiga terkait dengan disposisi dimana para anggota belum memiliki kemampuan secara kompeten di bidangnya mengingat organisasi ini bersifat kesukarelaan maka anggota yang ikut juga dari kalangan desa yang belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Keempat dimana struktur

organisasi dijelaskan bahwa dalam KIM struktur organisasi terdiri dari ketua dan anggota dimana struktur tersebut sebagai pembeda dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab.

Kendala yang dihadapi dimana diantaranya adalah Tidak adanya insentif yang menjadikan anggota KIM tidak berjalan sesuai dengan prosedur formal, rendahnya Pemahaman Ilmu Jurnalistik, rendahnya manajemen waktu dan rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Aldhama, Pinky, and Program Study. 2022. "Pengaruh Review Dan Affiliate Marketing Produk Marketplace Terhadap Impulse Buying Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Andon, P. 2018. "The Impact of Financial Incentives and Perceptions of Seriousness on Whistleblowing Intention." *Journal of Business Ethics* 151.
- Dian Lestari, Neta, and Bobby Agus Yusmiono. 2018. "Analisis Penggunaan Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mahasiswa Di Universitas Pgrri Palembang Tahun Akademik 2016/2017." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 3, no. 1: 41–51. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i1.1522>.
- Dwimawati, Eny. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Gunung Menyan." *Jurnal Abdi Dosen* 3, no. 1.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Elias, R. 2008. "Auditing Student Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing." *Managerial Auditing Journal* 23.
- Fitriani, Yuni. 2020. "Analisa Pemanfaatan Learning Management System Sebagai Media Pembelajaran Online Selama Pandemi Covid-19." *Journal of Information System , Informatics and Computing* 4, no. 2: 1–8.
- Gudykunst, W. B. 2003. *Cross Cultural and Intercultural Communication: Introduction*. In Thousand Oaks, CA. Second Edition: Sage Publication.
- Harefa, Darmawan. 2020. "Pengaruh Antara Motivasi Kerja Guru IPA Dan Disiplin Dengan Prestasi Kerja." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 3: 225. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.225-240.2020>.
- Namudat, Hasan, Nina Karlina, and Budiman Rusli. 2018. "Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital Di PT Freeport Indonesia." *Jurnal Responsive* 1, no. 2: 39–44.
- Pareek, Udai. 1996. *Perilaku Organisasi, Seri Manajemen No 98. LPPM*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Putri, Widy Amelia. 2022. "Pengaruh Insentif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Niat Melakukan." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 4: 761–74.
- Prihana, Vina Alin. 2016. *Pengaruh Whatsapp Messenger Terhadap Kinerja Komunikasi Organisasi*. Bandung: Universitas Telkom.

***Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten***

- Ridwan, Ade, Heru Nurasa, Mas Halimah, Program Pascasarjana, Kebijakan Publik, and Universitas Padjadjaran. 2020. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Emisi Gas Buang Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Responsive* 3, no. 4: 197–205.
- Santoso, Bibit. 2018. "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan." *Jurnal Pemerintahan* 13, no. 1.
- Sitorus, Amalia Azmi, and Muhammad Firdaus Rahmadi. 2021. "Disinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Indonesia Dalam Penanganan Covid-19." *Jurnal Renaissance* 6, no. 01: 721–32.
- Stikeleather, B. R. 2016. "When Do Employers Benefit from Offering Workers a Financial Reward for Reporting Internal Misconduct?" *Ccounting, Organizations and Society* 52.
- Subekti, Mening, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman. 2017. "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2: 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>.
- Surur, Agus Miftakus, and Ana Ulin Nadhirin. 2020. "Manajemen Waktu Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada TK Dharma Wanita 1 Baleturi." *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2: 81–94. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/2939>.
- Tyson, Shaun & Jackson, Tony. *The Essence of Organizational Behaviour*. UK: rentice Hall International, n.d.
- Wijaya, Andree. 2015. "Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan The Effect Of Ability And Motivation On E Mployee ' s Performance." *Jurnal Ekonomi* 1, no. 2015: 1–17.